



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG

TRIWULAN I TAHUN 2024

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikator kinerja PPN Brondong Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kinerja PPN Brondong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan PPN Brondong dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Lamongan, 26 April 2024  
Kepala Pelabuhan Perikanan  
Nusantara Brondong



Ibrahim

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong .....	3
1.4. Permasalahan.....	5
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	7
2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	16
3.2. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP .....	43
LAMPIRAN .....	44

## DAFTAR TABEL

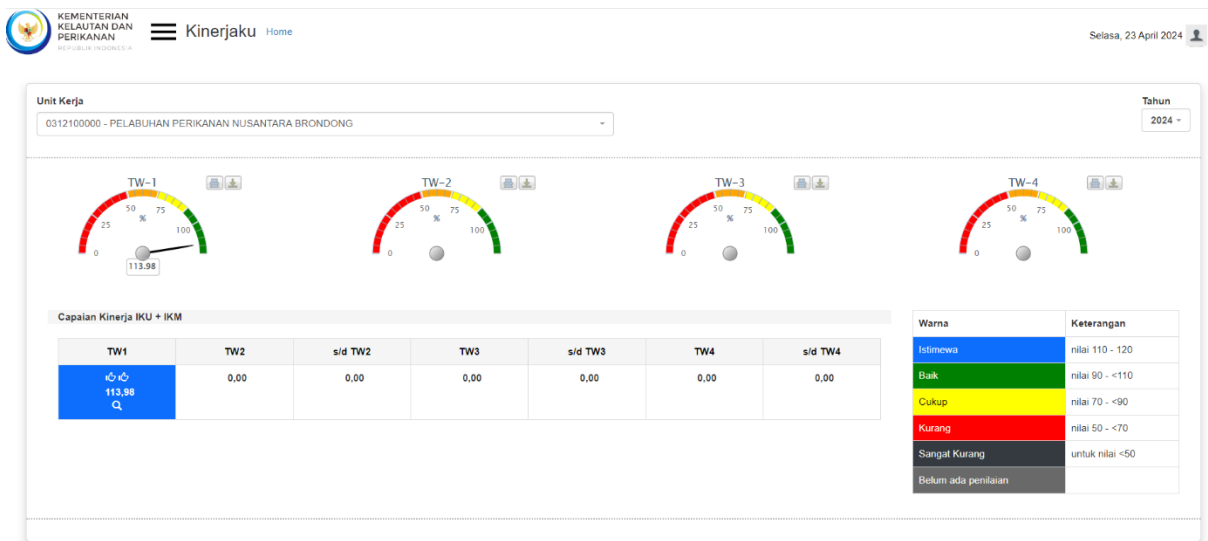
Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin .....	4
Tabel 2 Target Kinerja PPN Brondong Tahun 2024 .....	7
Tabel 3 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2024 .....	9
Tabel 4 Rencana Aksi PPN Brondong Tahun 2024 .....	10
Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi Triwula I Tahun 2024 .....	16
Tabel 6 Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 .....	18
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBPN Non SDA dengan Periode Sebelumnya .....	19
Tabel 8 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap .....	21
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan Periode Sebelumnya .....	21
Tabel 10 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong .....	23
Tabel 11 Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong dengan Periode Sebelumnya .....	24
Tabel 12 Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 .....	27
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan .....	27
Tabel 14 Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan .....	30
Tabel 15 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan .....	30
Tabel 16 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk .....	34
Tabel 17 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya .....	34
Tabel 18 Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024 .....	40
Tabel 19 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap .....	41
Tabel 20 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya .....	41
Tabel 21 Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerja PPN Brondong .....	v
Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2024 .....	4
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	4
Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	5
Gambar 5 Grafik Realisasi PNBPN Non SDA Per Bulan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024.....	19
Gambar 6 Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan .....	21
Gambar 7 Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024 .....	23
Gambar 8 Grafik Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Per Bulan.....	27
Gambar 9 Grafik Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Per Bulan.....	30

## RINGKASAN EKSEKUTIF

PPN Brondong pada Tahun 2024 mendapatkan alokasi awal anggaran sebesar Rp. 17.301.631.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan I sebesar Rp. 4.469.526.839,- atau (25.83%). Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 113,98 kategori **Istemewa**, hal ini didukung oleh tercapainya 7 capaian indikator kinerja.



Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerjaku PPN Brondong

Capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Brondong serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam meningkatkan kinerja kedepan dipandang perlu ketersediaan SDM yang berkompeten dan sesuai dengan beban kerja di PPN Brondong, serta ketersediaan sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan kinerja.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 5 (lima) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan.
2. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
3. Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
4. Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI).
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan

2. Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2023 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

## 1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, Tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantuan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;



10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

### 1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara, sebagai berikut :

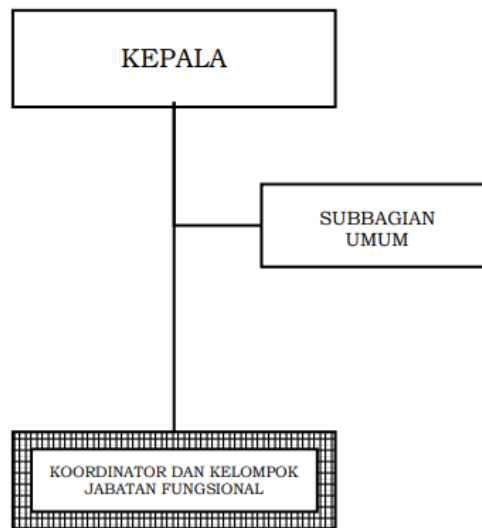
#### 1.3.1. Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

#### 1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA**

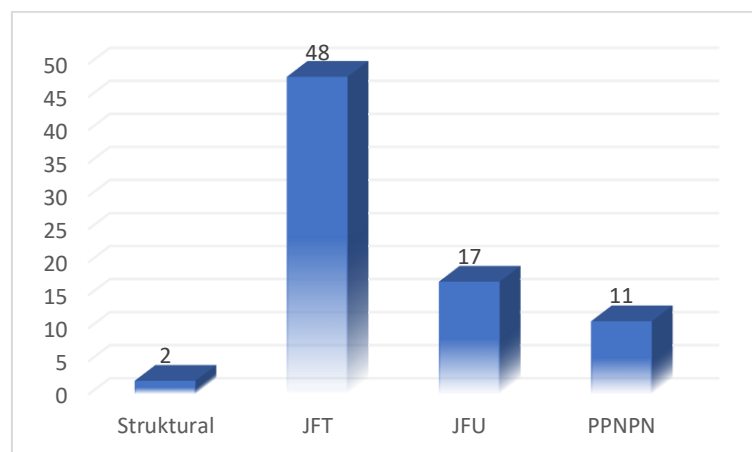


*Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2024*

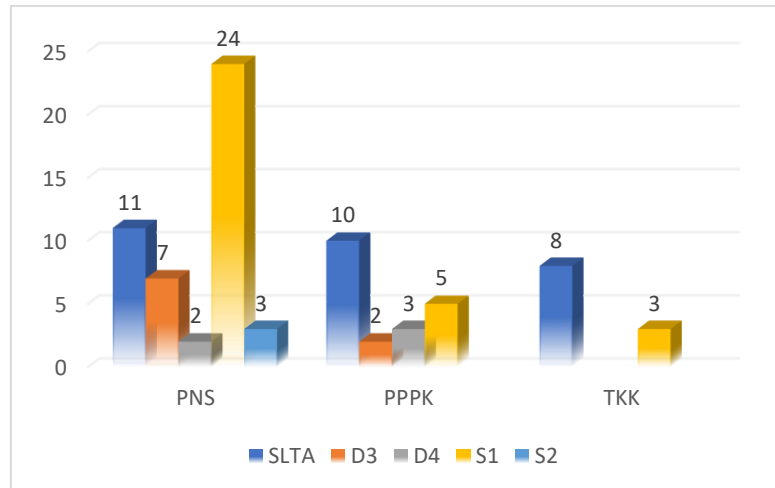
PPN Brondong di dukung oleh 78 orang pegawai yang terdiri atas PNS 47 orang (60,26%), PPPK 20 orang (25,64%) dan PPNPN 11 orang (14,10%). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada Triwulan I Tahun 2024 sebagai berikut :

*Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin*

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV		L	P	L+P
	L	P	L	P	L	P	L	P			
PNS	-	-	6	3	23	14	1	-	30	17	47
PPPK	-	-	9	3	5	3	-	-	14	6	20
PPNPN	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Jumlah	11	-	15	6	28	17	1	-	-	-	78



*Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan*



Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

#### 1.4. Permasalahan

Secara umum perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks yang disebabkan oleh banyak factor dan juga sensitive terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

1. **Kapasitas nelayan;** Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan serta minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.
2. **Kesejahteraan nelayan:** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi sebagian keluarga nelayan yang disebabkan rendahnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.
3. **Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
4. **Sarana prasarana usaha penangkapan ikan;** Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar

pelabuhan perikanan, serta; masih rendahnya produktivitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang reliable, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.

5. **Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha;** Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusatdaerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

#### 1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2024.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- 5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 6) **Bab V Lampiran**, berisi Perjajian Kinerja, penghargaan yang diraih dan dokumen lainnya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perumusan perjanjian kinerja tahun 2024 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2023 adalah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2 Target Kinerja PPN Brondong Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.006,75
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat	2	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	56.740
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Berdaya Saing	3	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	84
		5	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal	6	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	407
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	96
7	Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	80
		11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80
		12	Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	94
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	84
		14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80
		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,30



Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

*Tabel 3 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2024*

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan	38.000.000
	Pengelolaan pelabuhan perikanan	2.214.246.000
	Pengelolaan perizinan dan kenelayanan	4.000.000
	Pengelolaan sumber daya ikan	126.798.000
Dukungan Manajemen	Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.918.587.000
<b>Total</b>		<b>17.301.631.000</b>

## 2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai target-target kinerja yang telah disusun dan ditetapkan. Tujuan penyusunan rencana aksi sebagai alat monitor secara berkala terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif Internal Process dan Learning and Growth yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini (Tabel 4):





Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala											
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengumpulan dan Verifikasi Data Log Book penangkapan ikan	42.928.000	160	Laporan										1		
Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal	6	Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan pengadaan sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan	77.000.000	1	Unit					1						
				Pelaksanaan pembangunan/ pengembangan fasilitas peabuhan perikanan UPT Pusat untuk mendukung Penangkapan Ikan Terukur	596.798.000	1	Unit							1				
	7	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di pelabuhan perikanan	219.700.000	1	Lembaga											
Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Tim Kerja Kesyahbandaran	Pendukung layanan publik bidang kapal perikanan	25.000.000	40	Produk			10		20			30			40



Sasaran	Indikator Kinerja		Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)		Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	35.000.000	1	Layanan															
				Gaji dan Tunjangan	7.349.952.000	1	Layanan															
	14	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)		Pengadaan sarana perkanoran	1.192.608.000	1	Unit														1	
				Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	283.249.000	1	Unit															1
				Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	287.198.000	1	Unit															
	15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5.500.000.000	1	Layanan															1
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)		Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen	55.000.000	1	Layanan															1



Sasaran	Indikator Kinerja		Unit PJ	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Perikanan Tangkap																
				Monitoing, evlauasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	37.000.000	1	Layanan													1
	17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)		Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	126.580.000	1	Layanan													1
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)		Ketatalaksana an organisasi		1	Layanan													1

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja PPN Brondong Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2024. Capaian kinerja PPN Brondong pada 7 indikator kinerja utama dengan hasil secara keseluruhan tercapai dengan nilai 113,98, dan capaian masing-masing Indikator Kinerja dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Capaian Kinerja Organisasi Triwula I Tahun 2024

TAHUN ANGGARAN 2024											
MBAGA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											
UNIT KERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG											
NKO 113,98%											
Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2024	Target MARET	Capaian MARET	%	Target s/d MARET	Capaian s/d MARET	%
5.01	Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong						120			120	
IKS.01	Penerimaan PNPB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	Juta Rupiah	Maximize	Nilai Posisi Akhir	2.006,75	450	548,23	120	450	548,23	120
5.02	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat						120			120	
IKS.02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	Ton	Maximize	Nilai Posisi Akhir	56.740,00	8.000,00	12.585,00	120	8.000,00	12.585,00	120
5.03	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Berdaya Saing						111,11			111,11	
IKS.03.1	Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100	0	0		0	0	
IKS.03.2	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	84	84	93,33	111,1	84	93,33	111,1
IKS.03.3	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	95	0	0		0	0	
5.04	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal						120			120	
IKS.04.1	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85	0	0		0	0	
IKS.04.2	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Rata-rata	30,1	30,1	75,58	120	30,1	75,58	120
5.05	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong						102,39			102,39	
IKS.05	Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	Kapal	Maximize	Nilai Posisi Akhir	407	377	386	102,4	377	386	102,4
5.06	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong										
IKS.06	Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	96	0	0		0	0	
5.07	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong						110,37			110,37	
IKS.07.1	Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0		0	0	
IKS.07.2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	80	100	120	80	100	120
IKS.07.3	Nilai Rekonstruksi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	94	0	0		0	0	
IKS.07.4	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	84	0	0		0	0	
IKS.07.5	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0		0	0	
IKS.07.6	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Persen	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80	0	0		0	0	
IKS.07.7	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,76	0	0		0	0	
IKS.07.8	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	0	0		0	0	
IKS.07.9	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	88,3	88,3	88,95	100,7	88,3	88,95	100,7

Berdasarkan capaian kinerja diatas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini adalah capaian dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Brondong Tahun 2024:

## **S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

### **IKS 01.1. Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Juta Rupiah)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis penerimaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

Jenis PNBP yang berasal dari penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu:

1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1;
2. Bangunan Permanen;
3. Pemeliharaan Prasarana;
4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap;
5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang;
6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin;
7. Penggunaan ABF (Frezeer);
8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan
9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.

Jenis PNBP yang berasal dari jasa pelabuhan perikanan yaitu:

1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT);

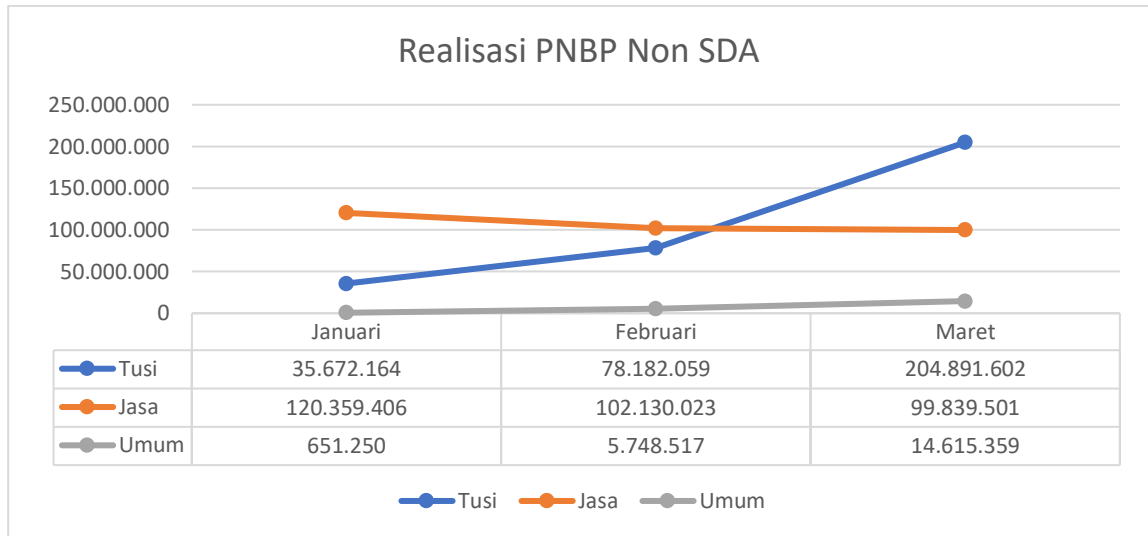
2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT);
3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan;
4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI;
5. Pelayanan bengkel;
6. Pelayanan jasa pas masuk harian;
7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan
8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup.

Pengukuran capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” sesuai dengan manual IKU yaitu “Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Capaian Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 548.235.658 yang terdiri dari:

1. Pendapatan Fungsional sebesar Rp. 527.220.532 yang terdiri dari:
  - a. PNBP Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi sebesar : Rp. 204.891.602.
  - b. PNBP jasa pelabuhan perikanan sebesar : Rp. 322.328.930
2. Pendapatan Umum sebesar Rp. 21.015.126.

*Tabel 6 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024*

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.006,75	450	548.24	121,83%	27,32%



Gambar 5 Grafik Realisasi PNBP Non SDA Per Bulan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
387,76	527,26	139,5	35,98

Berdasarkan pada tabel 5 diatas maka realisasi PNBP Non SDA pada PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 450 Juta Rupiah dengan realisasi 548,24 Juta Rupiah atau 121,83% dan sebesar 27,32% dari target Tahun 2024 sebesar 2.006,75 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 387,76 Juta Rupiah maka capaian PNBP Non SDA pada Triwulan I Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 139,5 Juta Rupiah atau 35,98%.

Tercapainya realisasi PNBP Non SDA pada Triwulan I Tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh langkah-langkah operasional yang dilaksanakan meliputi:

1. Melakukan identifikasi potensi-potensi kegiatan yang dapat menunjang peningkatan PNBP Non SDA di PPN Brondong.
2. Pembinaan terhadap stakeholder di PPN Brondong tentang sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Melakukan optimalisasi pada kegiatan pas masuk dengan memberlakukan pelayanan 24 jam.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas PPN Brondong.
5. Peningkatan kompetensi petugas pengelola PNBP.

Dalam meningkatkan kembali realisasi PNBPN Non SDA di PPN Brondong pada periode berikutnya maka perlu dilakukan langkah-langkah operasional sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi kembali terhadap potensi PNBPN Non SDA di PPN Brondong berdasarkan data aktivitas Tahun 2023.
2. Melakukan inovasi terhadap pelayanan usaha di PPN Brondong.
3. Meningkatkan kelengkapan fasilitas pelabuhan perikanan sesuai dengan kebutuhan usaha pengguna jasa.
4. Melakukan publikasi secara intens tentang potensi usaha dan keragaan operasional pelabuhan perikanan di PPN Brondong.

## **S.02 Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat**

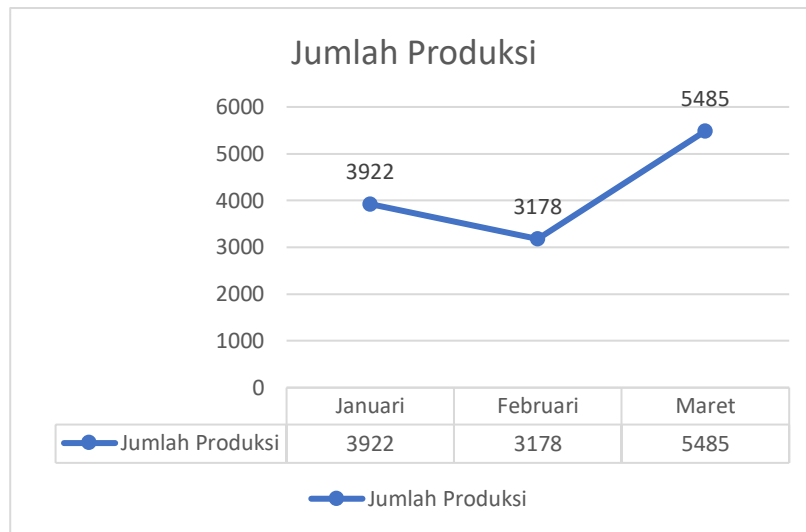
### **IKS 02.1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)**

Produksi perikanan tangkap mencakup semua hasil penangkapan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh, baik yang dijual atau yang dibayar sebagai upah. Volume produksi perikanan tangkap pada PPN Brondong merupakan hasil penangkapan ikan yang berasal dari laut oleh kapal penangkap ikan dan didaratkan di PPN Brondong. Tahapan dalam memperoleh volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong dimulai dari kegiatan pengumpulan data produksi oleh enumerator setiap hari dengan melakukan pencatan secara langsung hasil tangkapan setiap kapal perikanan yang mendaratkan ikan di PPN Brondong. Selanjutnya dilakukan pengolahan data oleh petugas pengelola data dengan merekapitulasi data enumerator sehingga diperoleh data volume produksi perikanan tangkap yang telah divalidasi internal. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai. Pada Triwulan I Tahun 2024, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong sebesar 12.585 ton.



Tabel 8 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	56.740	8.000	12.585	157,31%	22,18%



Gambar 6 Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
10.197	12.585	2.388	23,42%

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 sebesar 12.585 ton atau 157,31% dari target Triwulan I sebesar 8.000 ton dan sebesar 22,18% dari target Tahun 2024 sebesar 56.740 ton. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan I Tahun 2023 yaitu sebesar 10.197 ton maka capaian volume produksi perikanan tangkap Triwulan I Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 23,42% atau 2.388 ton.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" meliputi:

1. Metode pengambilan data dengan sistem sensus dengan melakukan pengambilan data produksi terhadap seluruh kapal perikanan yang melakukan pembongkaran ikan di PPN Brondong.

## 2. Peningkatan kompetensi dan jumlah petugas pengambil data (enumerator).

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu masih dilakukan secara manual dengan melakukan wawancara terhadap nakhoda dan informasi yang didapatkan masih dalam perkiraan. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh sistem kegiatan perikanan di PPN Brondong yang masih tradisional tanpa adanya pencatatan data oleh pemilik atau nakhoda terhadap hasil tangkapan ikan serta rantai distribusi yang kompleks.

Dalam rangka meningkatkan akurasi pendataan produksi perikanan tangkap di PPN Brondong perlu dilakukan dengan melakukan pengembangan sistem pendataan dan pengolahan data yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan penggunaan Informasi Teknologi (IT). Selanjutnya melakukan peningkatan kompetensi petugas pengambil data dan pengolah data serta meningkatkan komunikasi dengan para pemilik kapal. Nakhoda, dan pemangku kepentingan.

### **S.03 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang berdaya saing**

#### **IKS 03.1. Presentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :08/MEN/2012 memiliki 2 fungsi yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi perusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yaitu melakukan pembinaan dan pengolahan, melakukan pengumpulan data dan publikasi, melaksanakan fungsi karantina ikan, serta tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, melaksanakan kegiatan kapal perikanan, melakukan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuhn kapal perikanan dan kapal penelitian kelautan dan perikanan, melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan, dan melaksanakan kesyahbandaran, kepabeanan, dan/atau keimigrasian. Sedangkan fungsi perusahaan, pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta logistik dan perbekalan kapal pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

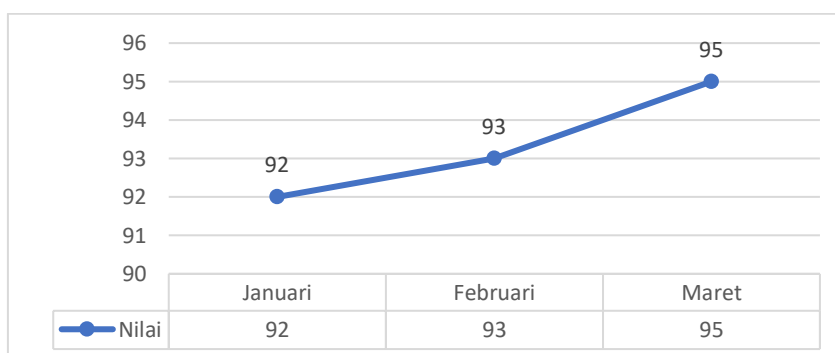
Dalam melakukan fungsi perusahaan terutama dalam pemanfaatan fasilitas dan lahan di Pelabuhan Perikanan perlu dilakukan proses analisa atau evaluasi terhadap permohonan perusahaan dalam rangka menghindari resiko yang terjadi kedepannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Triwulan I Tahun 2024 IKU “Presentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan tahunan.

### IKS 03. 2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Pelabuhan perikanan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam pemenuhan fasilitas maupun pelayanan yang merupakan indikator/ parameter bagi keberhasilan capaian kinerja pelabuhan perikanan. Kinerja operasional pelabuhan perikanan berkaitan dengan segala aktivitas operasional yang ada di pelabuhan perikanan mulai dari praproduksi, produksi, pengoJahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelas pelabuhan perikanan yang terdiri : a) administrasi dan sistem informasi, b) fasilitas pelabuhan perikanan, c) pelayanan umum, dan d) investasi dan industri. Capaian indikator tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024 sebesar 93,33.

Tabel 10 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	84	84	93,33	111,11%	111,11%



Gambar 7 Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
-	93,33	-	-

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” Triwulan I Tahun 2024 sebesar 93,33 atau 111,11% dari target Triwulan I yang ditetapkan sebesar 84 dan sebesar 111,11% dari target tahun 2024 sebesar 84. Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap jangka menengah karena adanya perbedaan indikator dengan periode sebelumnya. Pada bulan Januari – Maret 2024, tingkat kinerja operasional PPN Brondong menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan rata-rata 1.5.

Langkah-langkah operasional dalam rangka pelaksanaan pencapaian IKU “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” meliputi:

1. Peningkatan kompetensi para operator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) dalam melakukan entry data sesuai dengan ketentuan.
2. Dilakukan monitoring secara berkala oleh Tim Operasional Pelabuhan terhadap capaian laporan evaluasi kinerja.
3. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar tim kerja dalam pemenuhan data pada kinerja operasional pelabuhan sesuai dengan tugas dan fungsi tim kerja.

Hambatan yang dihadapi dalam kegiatan kinerja pelabuhan perikanan yaitu belum optimalnya kegiatan pendataan penyaluran logistik kapal perikanan yang berkisar pada 50% dari kebutuhan logistik kapal perikanan di PPN Brondong. Selain itu juga belum optimalnya pelayanan kedatangan kapal perikanan disebabkan karena perijinan. Langkah-langkah yang diambil guna meningkatkan capaian kinerja PPN Brondong kedepannya melalui peningkatan kompetensi petugas serta membangun komunikasi yang efektif antar tim kerja lingkup PPN Brondong.

### **IKS 03. 3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan

mempunyai tugas dan wewenang yaitu: (1) mengatur kedatangan kapal perikanan, (2) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, (3) menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal Perikanan, (4) mengatur keberangkatan kapal perikanan, (5) menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan, (6) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, (7) memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, (8) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, (9) memeriksa log book penangkapan ikan, (10) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, (11) mengawasi pemanduan, (12) mengawasi pengisian bahan bakar, (13) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, (14) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, (15) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan, (16) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, (17) pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan (18) memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Dalam mengukur tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong pada Tahun 2023 melalui 3 (tiga) indikator pelayanan administrasi pada tugas dan wewenang sayhbandar di pelabuhan perikanan yang meliputi: (1) jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), (2) jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan (3) jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Pada Triwulan I Tahun 2024 IKU “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan tahunan.

#### **S.04 Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal**

##### **IKS 04.1. Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Pengembangan aktivitas atau usaha perikanan di pelabuhan perikanan sering tidak diimbangi dengan pengembangan fasilitasnya sehingga menghambat terlaksananya aktivitas pelabuhan perikanan secara optimal. Pengembangan fasilitas ini penting dilaksanakan agar aktivitas dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan

fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan. Pada Triwulan I Tahun 2024 IKU “Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan tahunan.

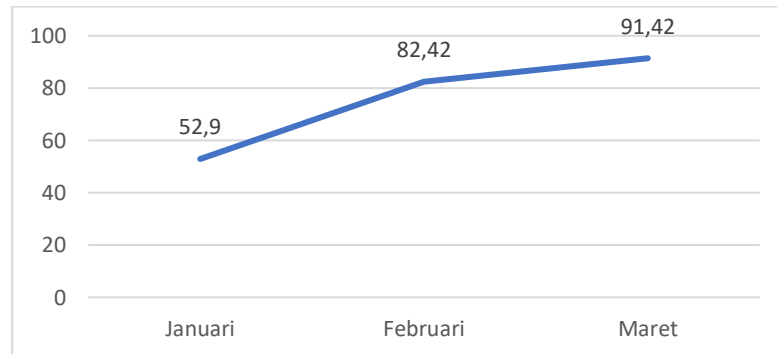
#### **IKS 04. 2. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Dalam kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dianggap perlu untuk ditinjau mengenai aspek lingkungan hidup sebagai kendali terhadap prakiraan terjadinya dampak pencemaran lingkungan dan perubahan di berbagai aspek, antara lain : aspek fisika-kimia (seperti : penurunan kualitas udara ambient, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas air laut, peningkatan air larian); aspek biologi (seperti : gangguan biota air); dan aspek sosial ekonomi dan budaya (seperti : gangguan lalu lintas darat, gangguan lalu lintas perairan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan persepsi masyarakat, timbulan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun) yang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan bekerjasama dengan pihak instansi atau pihak terkait yang dilakukan secara rutin dan periodik melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan untuk menguji baku mutu kandungan parameter perihal kegiatan tersebut.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan. Pada Triwulan I Tahun 2024 skore PPN Brondong dalam pelaksanaan program lingkungan hingga pencapaian kualitas lingkungan sebesar 75,58 dengan kategori **Baik**.

Tabel 12 Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,01	30,01	75,58	251,1%	251,1%



Gambar 8 Grafik Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Per Bulan

Tabel 13 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
-	75,58	-	-

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” Triwulan I Tahun 2024 sebesar 75,58 atau 251,10% dari target yang ditetapkan sebesar 30.01 dan sebesar 251,10% dari target tahun 2024 sebesar 30.01.

Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa terhadap jangka menengah karena adanya perbedaan indikator dengan periode sebelumnya. Pada bulan Januari – Maret 2024, nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong menunjukkan tren yang positif dengan kenaikan rata-rata 19,26.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pemantauan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, antara lain:

1. Hasil uji laboratorium terhadap kualitas air laut sebagian parameter masih dibawah baku mutu yang ditetapkan, hanya pada parameter total ammonia ( $\text{NH}_3\text{-N}$ ) yang mungkin disebabkan karena aktivitas pencucian ikan saat proses pembongkaran serta ditemukannya oil layer yang disebabkan oleh belum

tersedianya oil water separator pada kapal ikan tradisional;

2. Peningkatan timbulan sampah di kawasan pelabuhan telah berjalan dengan baik, hanya saja perlu adanya program 3R (reduce, reuse, recycle) yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi penuhnya tempat pembuangan sampah akhir;
3. Limbah cair di PPN Brondong berasal dari pencucian ikan dan aktivitas pemotongan kepala ikan masih belum dilakukan pengolahan karena IPAL yang ada belum terfungsikan;
4. Perspektif masyarakat dengan adanya operasional Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong positif, dan PPN Brondong selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan menerima segala masukan dari semua lapisan stakeholder terkait;
5. Kemungkinan terjadinya penurunan kinerja jalan, peningkatan potensi kebakaran dan timbulnya bau telah dilakukan upaya dengan mengoptimalkan petugas keamanan (security) dan petugas kebersihan pelabuhan sedangkan untuk aspek kebisingan masih dibawah ambang batas yang ditetapkan;
6. Potensi timbulnya limbah B3 telah diantisipasi dengan menempatkan tempat penampungan sementara limbah B3 yang tersedia di lokasi yang memungkinkan timbulnya limbah B3 seperti oli bekas;
7. Lebih dari 50% pekerja yang ada di kawasan pelabuhan merupakan warga lokal serta kesempatan kerja terbuka bagi siapa saja yang berminat dan untuk menunjang usaha Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong juga menyediakan lahan dan/ atau bangunan yang di sewakan untuk pelaku usaha yang terkait erat dengan aktivitas nelayan di kawasan pelabuhan;
8. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder di pelabuhan membuat gangguan kantibmas tidak terjadi dan petugas keamanan PPN brondong dibantu oleh aparat penegak hukum terkait selalu standby untuk menjaga kamtibmas di kawasan pelabuhan; dan
9. Adanya program Selaraskan turut membantu kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong khususnya dalam hal monitoring dan evaluasi.

Dalam menunjang kegiatan pengendalian lingkungan, rencana aksi periode selanjutnya yaitu :

1. Pelaksanaan ISO 14001:2015.



2. Melakukan sosialisasi kepada nelayan yang kapalnya beraktivitas di PPN Brondong untuk tidak langsung membuang air got yang mengandung minyak ke kolam pelabuhan.
3. Perlu adanya pencanangan program 3R (reduce, reuse, recycle) dan bank sampah.
4. Reaktivasi IPAL Pelabuhan atau pengelolaan limbah cair sederhana.
5. Terus konsisten menyerap aspirasi, saran dan masukan dari stakeholder dan melakukan perbaikan pada sektor terkait.
6. Menambah sarana penanggulangan kebakaran di kawasan pelabuhan.
7. Meningkatkan pengelolaan limbah B3 melalui kerjasama dengan pihak terkait dalam pengelolaan limbah B3 yang sudah di tamping.
8. Sosialisasi secara rutin terkait keamanan dan ketertiban di kawasan pelabuhan dan pelarangan peredaran miras dan obat-obatan terlarang yang mungkin menjadi pemicu terjadinya gangguan kamtibmas; dan
9. Menerapkan program selaraskan secara berkelanjutan sebagai bahan monitoring serta evaluasi pengelolaan dan pemantau lingkungan di kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong.

#### **S.05 Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

##### **IKS 05.1. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)**

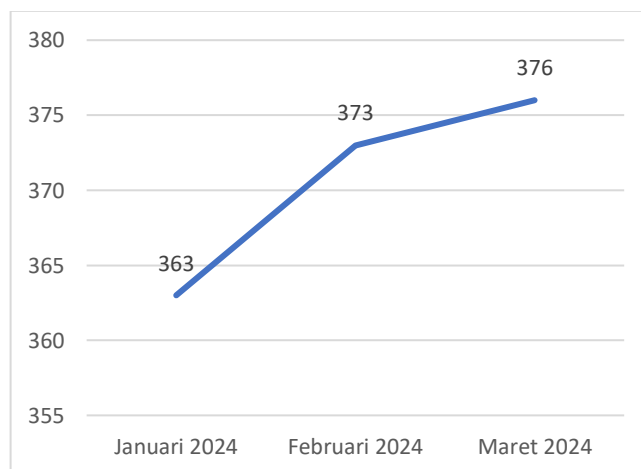
Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/ VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan

dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. PPN Brondong sebagai salah satu UPT pelaksana kebijakan pada Tahun 2024 telah menerbitkan sebanyak 376 dokumen SKKP sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

*Tabel 14 Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024*

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	407	377	386	102,39	94,84%



*Gambar 9 Grafik Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Per Bulan*

*Tabel 15 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024*

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
-	386	-	-

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” Triwulan I Tahun 2024 sebesar 386 atau 102,39% dari target yang ditetapkan sebesar 377 dan sebesar 94,84% dari target tahun 2024 sebesar 407. Pencapaian target pada triwulan I merupakan gabungan dari pencapaian

target tahun 2023 sebesar 367 dengan jumlah pada bulan Januari – Maret 2024 sebesar 19. Indikator ini tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap jangka menengah karena adanya perbedaan indikator dengan periode sebelumnya.

Pencapaian IKU “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” didukung oleh beberapa unsur dan upaya yang telah dilakukan diantaranya:

1. Tersedianya Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 6 (enam) orang;
2. Penyampaian permohonan penerbitan pembaharuan SKKP dapat dilakukan melalui Online; dan
3. Sinergitas dengan Pemerintah daerah dalam kegiatan Gerai pelayanan terpadu di lokasi sentra Nelayan atau Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pelayanan Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan khususnya SKKP di PPN Brondong pada tahun 2024, maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Penambahan, penyegaran dan peningkatan kompetensi Personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan PPN Brondong;
2. Penambahan peralatan kerja, alat pengolah data dan perlengkapan personel Petugas Pemeriksa Kelaikan Kapal Perikanan;
3. Perlu dilakukan Gerai pelayanan Dokumen Kapal Perikanan terpadu dengan instansi terkait secara berkala dan terjadwal pada sentra Nelayan dan/atau Pelabuhan Perikanan UPTD yang termasuk dalam wilayah Binaan PPN Brondong.

## **S.06 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

### **IKS 06.1. Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)**

Kompetensi Awak Kapal Perikanan yang ditingkatkan merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan

Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tatakelola Pengawakan Kapal Perikanan dengan focus melakukan Bimtek Kecakapan Nelayan dengan sasaran para Nelayan dengan Kapal ukuran sampai dengan 5 GT dengan diterbitkan Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN). Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menyelenggarakan Bimtek TOT untuk Instruktur dan sertifikasi Lembaga Bimtek SKN dalam upaya untuk melaksanakan Bimtek dan menerbitkan SKN bagi Nelayan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT.

Pada Triwulan I Tahun 2024 IKU “Presentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan tahunan.

## **S.07 Tata Kelola Pemerintah yang baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong**

### **IKS 07.1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA. Pengukuran capaian kinerja IK “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan tahunan.

## **IKS 07. 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

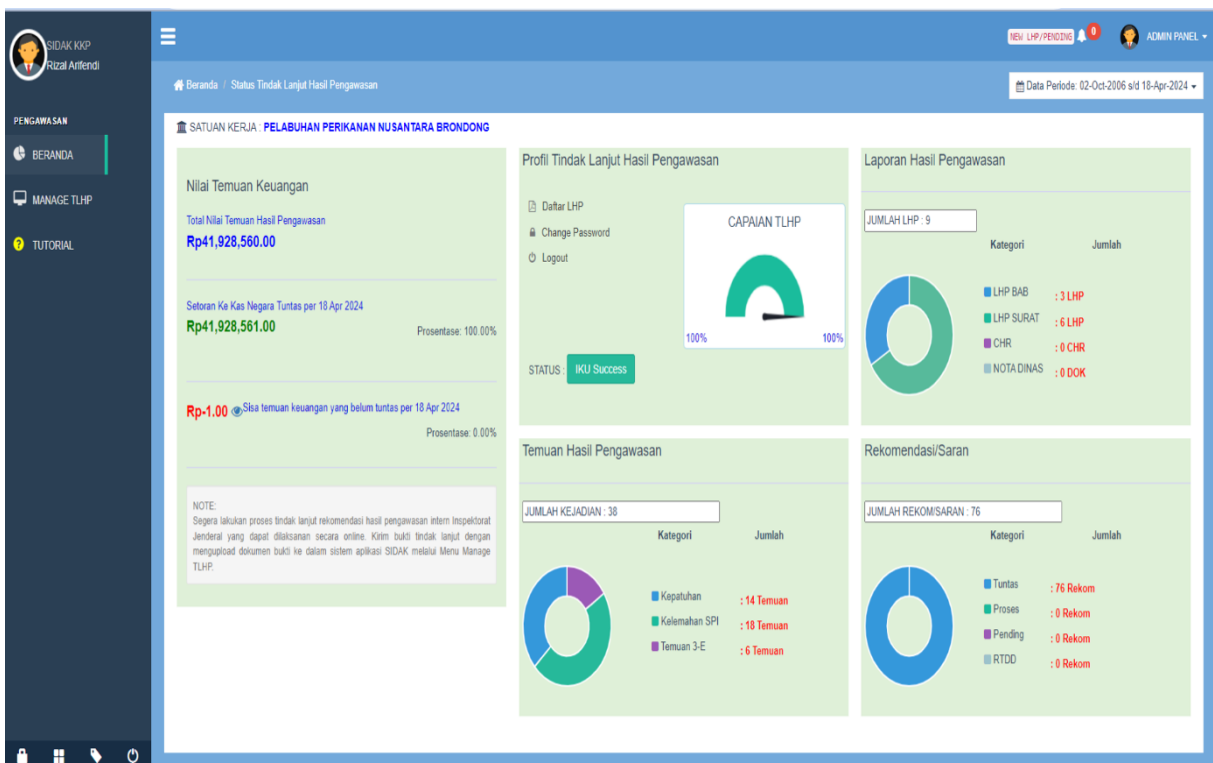
Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP. Tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Irjen KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, sebagaimana pada Pasal 20 PerMenKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 25 PERMENKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 disebutkan antara lain bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Untuk itu, semestinya, sudah menjadi kewajiban auditi, tanpa dipantau pun harus melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan mencapai 100% berstatus tuntas ditindaklanjuti dan dimanfaatkan.

Tabel 16 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	80	80	100	125%	125%



Gambar 9 Dashboard Aplikasi SIDAK

Tabel 17 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
100	100	0	0

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pemanfaatan untuk perbaikan dari rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2024 adalah 100% telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Brondong adalah 100% atau 125% dari target Triwulan I sebesar 80% dan sebesar 125% dari target tahun 2024 sebesar 80%. Dibandingkan capaian periode sebelumnya maka capaian Tahun 2024 adalah sama yaitu 100%.

Pencapaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2024 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu melakukan koordinasi secara intens secara internal dan eksternal terkait dalam menindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Dalam mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan hasil rekomendasi hasil pengawasan di PPN Brondong pada tahun 2024, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam progres tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan..
2. Membentuk tim khusus dalam rangka percepatan penyelesaian hasil pengawasan.

### **IKS 07.3. Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan, (2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Brondong pada Tahun 2023 didasarkan oleh SK KPA Nomor 17/PPNBR.KPA-22/KU.110/I/2023 tentang Penunjukkan Tim Pengelola Kinerja, Tim Penyusun LKJ dan Tim PM SAKIP Pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun Anggaran 2022. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan I Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja IK “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan karena dilakukan tahunan.

#### **IKS 07.4. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)**

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu



sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Pada Triwulan I Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja IK “Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan karena dilakukan semesteran.

#### **IKS 07. 5. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seringkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku. Pengukuran berdasarkan jumlah nilai dari beberapa indikator (1) ketersediaan manajemen risiko PBJ strategis, (2) perencanaan dan persiapan pengadaan, (3) presentase pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE, (4) kesesuaian tahap pelaksanaan (5) laporan penyelenggaraan PBJ, dan (6) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja IK “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan karena dilakukan tahunan.

## **IKS 07. 6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)**

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja IK “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan karena dilakukan tahunan.

## **IKS 07. 7. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas

perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja IK “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan karena dilakukan semesteran.

#### **IKS 07.8. Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)**

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan Efisiensi. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi

lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan I Tahun 2024, pengukuran capaian kinerja IK “Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan karena dilakukan tahunan.

### **IKS 07. 9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)**

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Hasil penilaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024 sebesar 88,95.

*Tabel 18 Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan I Tahun 2024*

Nama IKU	Target 2024	Triwulan I			% Terhadap Realisasi 2024
		Target	Realisasi	%	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	88,3	88,3	88,95	100,73%	100,73%

Tabel 19 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I Tahun 2024 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap											
Unit Pelayanan Publik	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Jumlah Responden	Hasil SKM
Direktorat PSDI	3,636	3,636	3,727	<b>3,364</b>	<b>3,545</b>	3,636	3,727	3,636	3,636	11	90,404
Direktorat KAPI	3,606	3,558	<b>3,452</b>	3,577	3,545	<b>3,499</b>	3,524	<b>3,477</b>	3,551	719	88,306
Direktorat PDK	3,677	3,563	<b>3,510</b>	3,583	3,563	3,552	<b>3,510</b>	<b>3,479</b>	3,594	96	88,976
BBPI	<b>3,439</b>	3,526	3,491	<b>3,561</b>	<b>3,509</b>	3,632	3,649	3,596	3,702	57	89,181
PPS Belawan	3,592	3,561	<b>3,551</b>	3,673	3,602	3,592	3,653	<b>3,520</b>	<b>3,490</b>	98	89,541
PPS Bitung	3,611	3,611	<b>3,530</b>	3,547	3,559	3,543	3,603	<b>3,538</b>	<b>3,518</b>	247	89,058
PPS Bungus	3,630	3,596	<b>3,578</b>	<b>3,578</b>	3,578	<b>3,552</b>	3,639	3,587	3,600	230	89,831
PPS Cilacap	3,683	3,651	3,627	<b>3,603</b>	<b>3,619</b>	3,635	3,675	3,643	<b>3,540</b>	126	90,763
PPS Kendari	3,700	3,744	<b>3,650</b>	3,711	3,694	<b>3,656</b>	3,694	<b>3,656</b>	3,667	180	92,145
PPS Nizam Zachman Jakarta	3,541	3,588	<b>3,506</b>	3,576	<b>3,518</b>	3,541	3,624	3,565	<b>3,494</b>	85	88,758
PPN Ambon	3,683	3,723	<b>3,554</b>	<b>3,376</b>	3,614	3,693	3,713	<b>3,604</b>	3,713	101	90,759
PPN Brondong	3,651	3,636	3,542	3,538	3,553	<b>3,527</b>	3,571	<b>3,509</b>	<b>3,495</b>	275	<b>88,949</b>
PPN Karangantu	3,724	3,686	3,657	3,787	<b>3,623</b>	3,661	3,724	<b>3,531</b>	<b>3,490</b>	239	91,341
PPN Kejawanan	3,682	3,652	<b>3,597</b>	3,627	<b>3,585</b>	3,624	3,700	3,621	<b>3,603</b>	330	90,808
PPN Kwandang	3,694	3,757	3,694	3,748	3,721	<b>3,640</b>	<b>3,640</b>	<b>3,676</b>	3,703	111	92,417
PPN Palabuhanratu	3,793	3,743	<b>3,636</b>	<b>3,593</b>	3,700	3,657	3,700	<b>3,636</b>	3,721	140	92,163
PPN Pekalongan	3,800	3,771	<b>3,700</b>	3,771	<b>3,743</b>	3,829	3,857	3,800	<b>3,729</b>	70	94,444
PPN Pemangkat	3,602	3,591	3,559	3,720	3,591	<b>3,538</b>	3,581	<b>3,548</b>	<b>3,452</b>	93	89,397
PPN Pengambang	3,859	3,744	<b>3,667</b>	3,769	3,756	3,744	3,769	<b>3,718</b>	<b>3,718</b>	78	93,732
PPN Prigi	3,654	3,610	3,621	3,615	3,626	<b>3,566</b>	<b>3,599</b>	3,604	<b>3,599</b>	182	90,263
PPN Sibolga	3,590	3,599	<b>3,553</b>	3,604	3,585	3,553	<b>3,544</b>	3,576	<b>3,548</b>	217	89,311
PPN Sungailiat	3,570	3,481	3,556	<b>3,163</b>	<b>3,496</b>	3,578	3,630	3,548	<b>3,319</b>	135	87,058
PPN Tanjungpandan	3,680	3,550	<b>3,510</b>	3,700	3,540	3,590	3,630	<b>3,480</b>	<b>3,490</b>	100	89,361

Tabel 20 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya

Realisasi (Rp)		Selisih (+/-)	%
TW I 2023	TW I 2024		
-	88,95	-	-

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai survey kepuasan masyarakat di PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 sebesar 88,949 atau 100,73% dari target yang ditetapkan sebesar 88,3 dan sebesar 100,73% dari target tahun 2024 sebesar 88.95. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan berdasarkan perubahan IKU PPN Brondong Tahun 2023, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Pencapaian IK "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong" tahun 2024 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu adanya peran aktif para pengguna jasa sebagai responden dan proaktif para petugas dalam melakukan pendampingan pengisian kuisisioner SKM melalui aplikasi Susan KKP. Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian SKM yang berkualitas di PPN Brondong pada tahun 2024, maka dilakukan upaya yaitu penyusunan tim SKM lingkup PPN Brondong dan melakukan perbaikan pada pelayanan di PPN Brondong.

### 3.2. Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada Triwulan I Tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.301.631.000,- dengan realisasi belanja pada Triwulan I sebesar Rp. 4.469.526.839,- atau (25.83%). Rincian realisasi anggaran PPN Brondong pada Triwulan I Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

*Tabel 21 Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024*

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2337   Pengelolaan Kapal Perikanan Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	38.000.000	9.627.864	25.34
2338   Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.540.448.000	144.639.764	7.15
2339   Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	4.000.000	1.600.000	40
2341   Pengelolaan Sumber Daya Ikan	126.798.000	1.005.000	0.79
2342   Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	14.918.587.000	4.298.997.411	28.82
<b>Total</b>	<b>17.301.631.000</b>	<b>4.469.526.839</b>	<b>25.83</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada PPN Brondong Triwulan I Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja PPN Brondong dalam mencapai sasaran program dan mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.



a. Perjanjian Kinerja 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ibrahim

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tb. Haeru Rahayu

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara  
Brondong



Ibrahim



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.006,75
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	56.740
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Berdaya Saing	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	84
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
4	Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal	6 Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,10
5	Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang Berdaya Saing di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	407
6	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan yang Tersertifikasi/Terlindungi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	9 Persentase Peningkatan Pengetahuan Kompetensi dan Perlindungan Nelayan/Awak Kapal Perikanan (Persen)	96
7	Tata Kelola Pemerintah yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	80
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80
		12 Nilai Rekonsiliasi kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	94
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	84
		14 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80

		15	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	80
		16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	93,76
		17	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	86
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,30

Program : 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan Rp. 2.383.044.000,-  
2. Dukungan Manajemen Rp. 14.918.567.000,-  
Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 17.301.631.000,-

Jakarta, 10 Januari 2024

Pihak Kedua  
Pit. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong



Ibrahim





